



Diplomasi Digital dan Isu Keamanan di Indonesia: Studi Kualitatif terhadap Media Sosial Kementerian Luar Negeri

Ismaya Saputri^{1*}, Sidik Jatmika²

¹Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, saputriismaya@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, sidikjatmika@umy.ac.id

*Corresponding Author: saputriismaya@gmail.com

Abstract: *Digital diplomacy in Indonesia experienced significant changes during the Covid-19 pandemic. Digital diplomacy was used by the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia to establish cooperation with other countries due to the paralysis of communication during the COVID-19 pandemic. In implementing digital diplomacy, the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia carries two important issues: human security and state security. This research aims to describe "How does the Ministry of Foreign Affairs Indonesia project security issues in its digital diplomacy?" using descriptive qualitative methods and data processing using the NVIVO 12 Pro application. The results of this research show that the current digital diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia focuses more on human security issues. The most widely used instrument is the news portal. This research needs to be done because digital diplomacy has become a new instrument practiced by all countries to deliver their public diplomacy, and a shift in the perspective of security issues.*

Keywords: *Digital Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Human Security, State Security*

Abstrak: Diplomasi digital di Indonesia mengalami perubahan yang besar saat pandemi Covid-19. Diplomasi digital dimanfaatkan Kementerian luar negeri Indonesia untuk memperluas agenda diplomasi publiknya salah satunya menjalin kerjasama dengan negara lain dikarenakan lumpuhnya komunikasi saat pandemi Covid-19. Dalam melaksanakan diplomasi digital, Kementerian luar negeri Indonesia mengusung dua isu penting yaitu *human security* dan *state security*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan "Bagaimana Kementerian Luar Negeri Indonesia memproyeksikan isu keamanan dalam diplomasi digitalnya?" dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pengolahan data menggunakan aplikasi NVIVO 12 Pro. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah diplomasi digital Kementerian Luar Negeri Indonesia saat ini lebih berfokus pada isu *human security* dengan instrumen yang paling banyak digunakan adalah portal berita. Penelitian ini perlu untuk dilakukan karena diplomasi digital telah menjadi instrumen baru yang digunakan seluruh negara di dunia dalam penyampaian diplomasi publiknya serta adanya pergeseran perspektif isu keamanan secara global.

Kata Kunci: Diplomasi Digital, Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Human Security, State Security*

PENDAHULUAN

Dunia tengah menghadapi ancaman dan ketidakstabilan dengan intensitas yang tinggi. Ketidakstabilan ini mencakup kawasan dan negara. Negara yang tidak mengalami konflik secara terbuka juga menghadapi ketidakstabilan ini. Adapun beberapa ancaman global yang saat ini dihadapi dunia adalah perang, penggunaan senjata tidak konvensional maupun senjata kimia, perpindahan penduduk secara besar-besaran, ketidakamanan lingkungan, terorisme dan kejahatan transnasional, ketidakamanan kesehatan, kemiskinan serta krisis keamanan manusia lainnya. Ancaman dan ketidakstabilan dunia yang masif inilah yang kemudian menjadi tantangan baru bagi para pembuat kebijakan bagi suatu negara (Center for Strategic and International Studies, 2024).

Perubahan terhadap ancaman keamanan banyak terjadi saat ini. Hal ini seperti perubahan iklim yang sebelumnya dilihat sebagai permasalahan biasa telah menjelma menjadi ancaman serius bagi umat manusia khususnya negara-negara kepulauan kecil. Perubahan iklim mempengaruhi keamanan manusia di semua negara. Terancamnya keamanan manusia ini tidak terlepas dari banjir, kelaparan, kekeringan, terganggunya mata pencaharian masyarakat, perubahan budaya masyarakat, terjadinya peningkatan konflik di suatu wilayah, dan migrasi penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya (Subiyanto et al., 2018).

Krisis pangan telah menjadi ancaman paling menakutkan bagi seluruh negara di dunia. Ketidakamanan dalam pangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, konflik atau perang seperti halnya perang yang terjadi di Ukraina dan konflik Timur Tengah yang berkepanjangan. Perang Ukraina-Rusia telah menyebabkan sulitnya akses terhadap beberapa bahan pangan. Konflik dengan disertai kekerasan merupakan faktor utama penyebab krisis pangan di dunia. Tidak hanya krisis pangan konflik kekerasan juga menimbulkan krisis lainnya seperti gizi buruk yang berdampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang, penyebaran terorisme, terbentuknya jaringan kriminal dan kerentanan suatu negara. Kedua adalah perubahan iklim ekstrim yang mengganggu pertanian dan ketiga adalah pandemi Covid-19 yang mengguncang perekonomian dunia (Kemmerling et al., 2022).

Covid-19 muncul sebagai ancaman baru bagi dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Karantina wilayah yang diterapkan oleh negara-negara di dunia telah menyebabkan ketidakpastian terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan ekonomi dialami oleh negara-negara maju maupun negara berkembang dikarenakan terbatasnya perjalanan masyarakat dan perdagangan dengan negara lain. Pandemi Covid-19 menciptakan tantangan kesehatan global dimana ratusan juta orang terinfeksi penyakit ini di seluruh dunia. Tantangan kesehatan akibat Covid-19 lebih banyak dirasakan oleh negara-negara berpenghasilan rendah maupun menengah karena kurangnya infrastruktur, sumber daya serta masyarakat yang miskin (Shrestha et al., 2020).

Tidak hanya menjadi pendorong terguncangnya pertumbuhan ekonomi dan kesehatan, pandemi Covid-19 juga telah mempengaruhi pendidikan, pekerjaan, mobilitas individu dan interaksi sosial. Pembatasan interaksi sosial, penggunaan masker dan penutupan wilayah yang diterapkan oleh negara-negara di dunia dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit telah mempengaruhi kehidupan secara menyeluruh khususnya dalam hal berkomunikasi antara satu individu dengan yang lainnya (Saunders et al., 2021).

Di dalam praktik diplomasi, komunikasi merupakan kunci paling utama. Sehingga untuk tetap dapat menjalin komunikasi selama pandemi Covid-19, media komunikasi telah mengalami pergeseran yaitu lebih banyak menggunakan platform digital. Pandemi telah menyebabkan setiap negara memproyeksikan kebijakan luar negerinya kepada audiens

domestik maupun internasional. Sebelum pandemi, sangat sedikit pihak yang mengakui peran dari diplomasi digital. Akan tetapi setelah pandemi, diplomasi digital memegang peran penting dalam mempromosikan agenda diplomatik suatu negara (Sharma & Sisodia, 2021).

Perkembangan dalam bidang teknologi telah membawa perubahan terhadap berjalannya suatu pemerintahan. Pemerintah dapat lebih mudah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai teknologi (Simorangkir, Arnold Hiras & Runtutambi, 2024). Diplomasi digital dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai, gagasan, ideologi, mencari solusi atas suatu konflik, mengumpulkan dukungan dalam perpolitikan dalam negeri maupun internasional, hingga mendapatkan dukungan dalam perdagangan dan kerjasama antarnegara (Diara, 2020). Pergeseran budaya diplomasi menyebabkan Kementerian Luar Negeri harus mampu memanfaatkan internet bukan hanya untuk mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan tetapi juga dapat mencari cara agar dapat membangun citra kepada publik melalui internet. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan diplomasi digital menjadi kompleks (Wangke, 2020).

Diplomasi digital saat ini telah menjadi subjek pengawasan dan kepentingan publik yang utama seiring dengan perubahan teknologi. Perubahan terhadap budaya diplomasi ini juga menyebabkan perubahan fungsi dari diplomat dan kementerian luar negeri. Sebagian besar negara dan Kementerian luar negeri di dunia telah mengadopsi strategi ini. Diketahui bahwa Twitter dan Facebook merupakan platform digital online paling utama yang digunakan sebagai alat diplomasi digital (Ong'ong'a, 2021).

Melalui kementerian luar negeri, Indonesia mulai aktif di beberapa platform sosial media dan portal berita untuk melaksanakan diplomasi digitalnya. Dikarenakan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian mengenai diplomasi digital Indonesia yang berkaitan dengan isu keamanan. Oleh sebab itu, penulis akan menganalisis mengenai bagaimana Kementerian Luar Negeri Indonesia memproyeksikan isu keamanan dalam diplomasi digitalnya melalui empat platform sosial media dan satu portal berita resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menganalisa mengenai pelaksanaan diplomasi digital di Indonesia. Penulis juga akan menggunakan sumber sekunder dari jurnal, berita online, penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis pelaksanaan diplomasi digital Indonesia melalui sosial media dan portal berita resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Adapun akun sosial media tersebut adalah akun resmi Kemlu RI di Facebook (@Kemlu.RI), Instagram (@kemlu_ri), Twitter atau sekarang bernama X (@Kemlu_RI), Youtube (@MoFAIndonesia) dan portal berita resmi di <https://www.kemlu.go.id/portal/id/berita> dengan rentan waktu pengambilan data postingan pasca pandemi Covid-19 yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023.

Penulis melakukan olah data menggunakan aplikasi Nvivo 12 Pro dengan memanfaatkan fitur Word-cloud, Tree-map dan Crosstab. Fitur Word-cloud dan Tree-map akan digunakan untuk menganalisis kata yang paling banyak dibahas di dalam diplomasi digital Kementerian luar negeri Indonesia. Dari fitur ini akan memperlihatkan fokus diplomasi digital Kementerian luar negeri Indonesia. Fitur Crosstab digunakan untuk menganalisis pengarusutamaan yang tercermin dalam diplomasi digital Kementerian Luar negeri Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak kelima di dunia pelaksanaan diplomasi digital semakin dioptimalkan. Saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai kebijakan diterapkan untuk mendukung diplomasi digital. Kementerian Luar Negeri Indonesia dan kedutaan besar juga telah memberikan upaya maksimal dengan membuat

berbagai akun blog pribadi maupun media sosial resmi instansi. Hal ini dilakukan agar diplomasi digital Indonesia dapat bersaing dengan diplomasi digital negara-negara lain (Moenardy & Chandra, 2021).

Semakin aktifnya diplomasi digital Indonesia ini terjadi karena banyaknya dukungan dari pemerintah Indonesia. Bahkan beberapa tokoh penting Indonesia berperan penting dalam memaksimalkan diplomasi digital Indonesia (Syaifani & Qubba, 2017). Diplomasi digital Indonesia telah mengalami perkembangan yang besar dalam memperjuangkan gagasan-gagasan dan kepentingan nasionalnya. Indonesia semakin meningkatkan peran digital sebagai sarana atau alat untuk mempromosikan kebijakan-kebijakannya serta mempromosikan negara Indonesia itu sendiri ke masyarakat internasional. Penerapan kebijakan yang mendukung diplomasi digital juga terus ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia (Nisa, 2022).

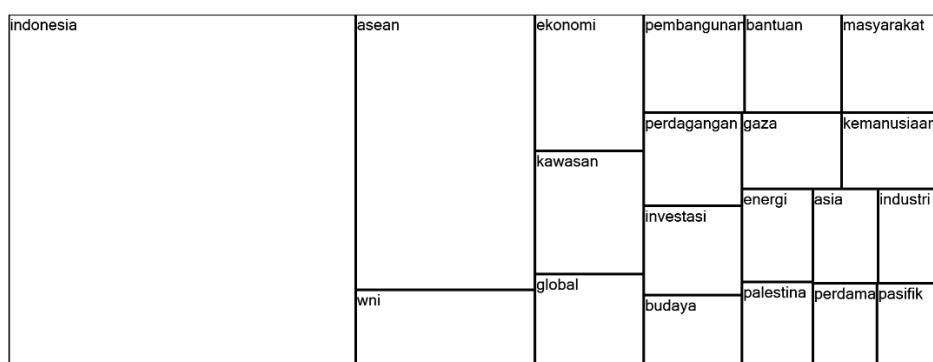
Hasil data yang ditemukan oleh penulis dengan kurun waktu januari sampai dengan desember tahun 2023 yang berkaitan dengan isu keamanan berjumlah 1.257 unggahan. Rincian pengumpulan data tersebut adalah 54 unggahan di Facebook, 145 unggahan di Instagram, 300 unggahan di Twitter (X), 115 unggahan di Youtube, dan 643 unggahan di portal berita.

Berdasarkan data dari lima instrumen diplomasi digital Kementerian luar negeri Indonesia yang diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Pro, ditemukan hasil berupa word cloud frequency dan word frequency tree-map. Kedua fitur menunjukkan beberapa kata yang paling banyak muncul dalam postingan Kementerian luar negeri Indonesia. Hasil olah data tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.



Sumber: diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 Pro

Gambar 1. Word cloud frequency

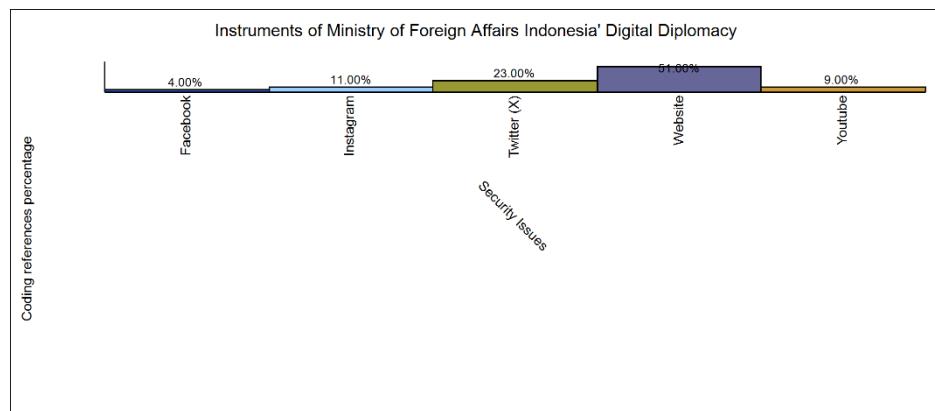


Sumber: diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 Pro

Gambar 2. Word frequency tree-map

Dari fitur Word Frequency menggunakan Word Cloud dan Tree Map di atas dapat dilihat bahwa kata yang paling banyak digunakan dalam postingan sosial media dan portal berita resmi Kemenlu RI adalah “Indonesia”, “Asean”, “Wni”, “ekonomi”, “kawasan”, dan “global”. Hal ini dapat diartikan bahwa gagasan utama dalam diplomasi digital Kementerian luar negeri Indonesia adalah melindungi Wni dan meningkatkan ekonomi Indonesia di kawasan Asean maupun Global. Selain itu, isu-isu lain yang juga ikut menjadi perhatian Kementerian luar negeri Indonesia di dalam diplomasi digitalnya adalah mengenai pembangunan di dalam negeri maupun di perbatasan, bantuan kemanusiaan, keamanan masyarakat, perdagangan antar negara, investasi dan budaya.

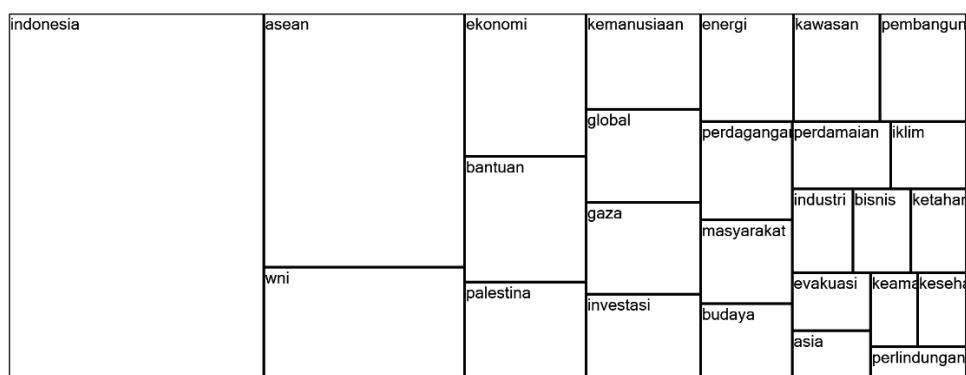
Selain Word frequency, penulis juga menggunakan fitur crosstab. Penulis menganalisis diplomasi digital Kementerian luar negeri Indonesia yang berkaitan isu keamanan dengan menetapkan dua fokus utama yaitu human security dan state security. Fitur crosstab digunakan untuk melihat isu utama yang tercermin di dalam diplomasi digital Kementerian luar negeri Indonesia. Crosstab analysis mengenai pelaksanaan diplomasi digital Indonesia dapat dilihat pada gambar 3, 4, 5 dan 6.



Sumber: diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 Pro

Gambar 3. Instrumen diplomasi digital Kementerian Luar Negeri Indonesia

Dari pengolahan data berdasarkan kategori isu human security, didapatkan hasil bahwa Kementerian luar negeri Indonesia paling banyak menggunakan instrumen portal berita dalam melakukan diplomasi digitalnya yaitu sejumlah 51%. Instrumen kedua yang paling banyak digunakan adalah Twitter (X) sebanyak 23%, kemudian Instragram 11%, keempat Youtube 9% dan yang paling sedikit digunakan adalah Facebook sebesar 4%.



Sumber: diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 Pro

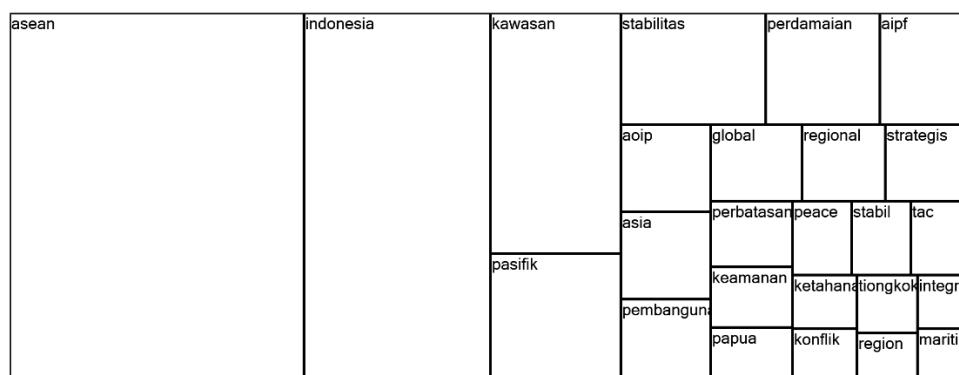
Gambar 4. Word frequency tree-map isu human security

Berdasarkan olah data menggunakan fitur word frequency tree-map didapatkan hasil

kata-kata yang paling banyak digunakan dalam postingan yang berkaitan dengan isu *human security* adalah “Indonesia”, “Asean”, “WNI”, “ekonomi”, “bantuan”, “kemanusiaan”. Hal ini menunjukkan bahwa isu human security diplomasi digital kementerian luar negeri Indonesia mengutamakan isu wni, ekonomi, bantuan dan kemanusiaan baik di dalam negeri maupun di dalam kawasan Asean.

Selama bertahun-tahun dalam politik luar negeri Indonesia, diplomasi perlindungan WNI telah menjadi prioritas kedua. Sistem perlindungan wni juga terus dikembangkan dan diperkuat dengan dibentuknya direktorat perlindungan warga negara Indonesia, melakukan perjanjian-perjanjian dengan negara penerima warga negara Indonesia, penguatan instrumen hukum. membangun sarana di luar negeri untuk melindungi warga negara Indonesia serta menjadikan perlindungan wni sebagai kurikulum pendidikan diplomat yang utama (Koraag & Ahmad, 2024). Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan luar negeri presiden Joko Widodo berfokus pada investasi dan perdagangan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur Indonesia. Diplomasi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berfokus pada rakyat (Wardhani & Dugis, 2023).

Menteri luar negeri Indonesia periode tahun 2014-2024 Retno Marsuadi menyebutkan bahwa diplomasi digital memiliki beberapa manfaat yaitu menyebar pesan perdamaian ke seluruh dunia, berguna untuk menguatkan kerja sama ekonomi, dapat digunakan untuk melindungi warga negara, manfaat dalam memajukan pembangunan. Indonesia telah memanfaatkan perkembangan dalam bidang teknologi digital untuk peningkatan pelayanan dan melindungi warga negaranya di luar negeri dengan pembuatan aplikasi safe travel dan portal peduli WNI (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

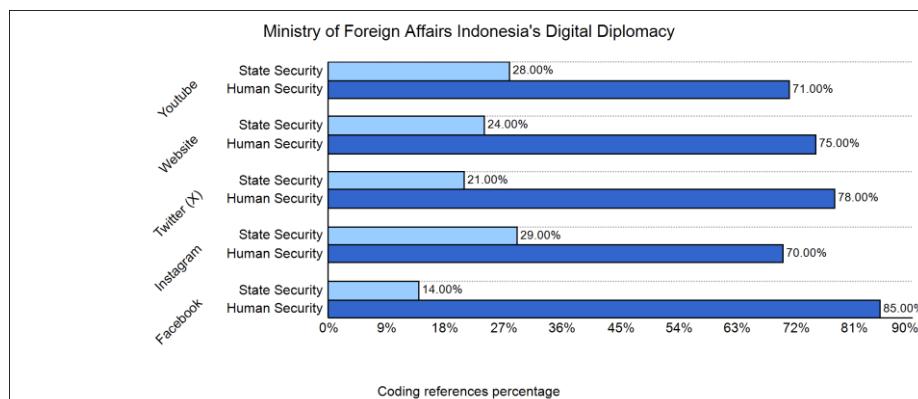


Sumber: diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 Pro
Gambar 5. Word frequency tree-map isu state security

Penulis melakukan pengolahan data diplomasi digital Kementerian luar negeri Indonesia berdasarkan isu *state security* dan mendapatkan hasil berupa word frequency tree-map. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kata-kata yang paling banyak digunakan terkait isu state security adalah “Asean”, “Indonesia”, “Kawasan”, “Pasifik”, “stabilitas”, “perdamaian”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kementerian luar negeri Indonesia berfokus pada stabilitas dan perdamaian di Kawasan Indo Pasifik.

Sebagai kawasan tersibuk dan terpenting dalam perdagangan global, kawasan Indo-Pasifik yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah menjelma menjadi kawasan yang sangat penting bagi semua negara. Kawasan ini menjadi pusat persaingan bagi negara-negara besar di dunia dan menciptakan ketegangan kompleks dan berlarut-larut di sekitar kawasan. Ketegangan tersebut diantaranya adalah sengketa antara India dan China, serta gejolak di Laut China Selatan dan Semenanjuk Korea. Indonesia yang berada di dalam kawasan Indo-Pasifik juga merasakan ketidakstabilan pada kawasan ini (Biro Humas Lemhannas RI, 2024).

Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri luar negeri Retno Marsudi bahwa Indonesia berupaya untuk melakukan pembangunan sistem regional secara inklusif yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan damai. Indonesia merupakan pusat dari interaksi di antara negara-negara Asia Tenggara dan Asia Tenggara merupakan inti dari Indo-Pasifik. Faktor ini telah menjadikan Indonesia sebagai aktor utama yang berpengaruh besar di dalam kawasan Indo-Pasifik sehingga Indonesia memiliki keharusan untuk mempengaruhi atas keamanan kawasan tersebut (Nurhasya, 2018).



Sumber: diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 Pro

Gambar 6. Perbandingan isu keamanan diplomasi digital Kementerian Luar Negeri Indonesia

Berdasarkan gambar di atas perbandingan antara isu human security dan state security terlihat dengan jelas. Dari kelima instrumen diplomasi digital Kementerian Luar Negeri Indonesia, isu human security lebih besar dibandingkan dengan isu state security. Selisih antara keduanya juga terlihat cukup besar. Selisih terbesar antara isu human security dan state security terdapat pada Facebook yaitu sebesar 71% dan sosial media dengan selisih terbesar kedua adalah Twitter (X) sebesar 57%. Sedangkan selisih terkecil dari kelima instrumen diplomasi digital Kementerian luar negeri Indonesia adalah Instagram dimana selisih dari kedua isu adalah sebesar 41%.

Tabel 1. Persentase Unggahan dalam Setahun

	Human Security	State Security	Total
Facebook	85.96%	14.04%	100%
Instagram	70.97%	29.03%	100%
Twitter (X)	78.12%	21.88%	100%
Website	75.64%	24.36%	100%
Youtube	71.43%	28.57%	100%
Total	75.56%	24.44%	100%

Sumber: diolah oleh penulis menggunakan NVivo 12 Pro

Dari gabungan kedua isu yang tercermin dalam diplomasi digital Kemenlu RI, maka dapat dilihat bahwa diplomasi digital Kementerian luar negeri Indonesia lebih mengutamakan isu human security daripada state security. Hal ini terlihat dari tabel persentase unggahan kelima instrumen diplomasi digital Kementerian luar negeri Indonesia di atas. Persentase unggahan yang berkaitan dengan isu *human security* yaitu 75,56% jauh melampaui persentase unggahan yang berkaitan dengan isu *state security* yang hanya sebesar 24,44%.

Isu keamanan telah mengalami banyak perubahan setelah perang dingin dimana saat ini keamanan dipandang dalam aspek keamanan manusia daripada keamanan negara. Keamanan yang awalnya lebih berfokus pada keamanan negara disebabkan oleh persaingan blok barat dan

timur kini mulai beralih ke isu-isu yang terkait dengan keamanan manusia. Perspektif keamanan manusia memiliki beberapa komponen di dalamnya yaitu freedom for fear atau bebas dari rasa takut, freedom for want atau kebebasan dari kekurangan atas kebutuhan, freedom to live in dignity atau bebas untuk hidup bermartabat (Hara et al., 2023).

Menurut laporan UNDP 1994 sudah saatnya keamanan lebih ditekankan terhadap keamanan manusia bukan lagi keamanan teritorial. Keamanan seharusnya membahas mengenai keamanan makanan, pekerjaan dan lingkungan. Keamanan juga sebaiknya lebih berfokus pada pembangunan manusia berkelanjutan bukan lagi hanya mengenai persenjataan (United Nations Development Programme, 1994).

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta tahun 2023, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini dunia tengah mengalami tantangan yang sangat kompleks dimana terjadi perang, konflik dan bencana alam di berbagai bagian dunia dan menghadapi krisis lainnya seperti krisis pangan, krisis keuangan, krisis energi. Dari segala macam permasalahan yang dihadapi tersebut yang merasakan dampak terbesarnya adalah rakyat (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Dari pernyataan tersebut dapat terlihat arah kepentingan nasional Indonesia terkait isu keamanan adalah *human security*.

KESIMPULAN

Diplomasi digital Kementerian Luar Negeri Indonesia dilaksanakan menggunakan lima instrumen yaitu portal berita, Twitter (X), Facebook, Instagram dan Youtube. Instrumen diplomasi yang paling banyak digunakan oleh Kementerian luar negeri Indonesia adalah portal berita di website resminya sedangkan instrumen yang paling sedikit digunakan adalah Facebook.

Isu human security dalam diplomasi digital Kementerian luar negeri Indonesia berfokus pada perlindungan WNI dan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir keduanya menjadi politik luar negeri utama bagi Indonesia. Sedangkan isu state security berfokus pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Diplomasi digital Kementerian luar negeri Indonesia dilaksanakan berfokus pada isu human security daripada isu state security dalam diplomasi digitalnya. Keamanan manusia yang lebih kompleks menyebabkan adanya pergeseran bidang keamanan yang sebelumnya lebih fokus pada negara. Hal ini terjadi setelah berakhirnya perang dingin dan dimulainya globalisasi secara besar-besaran.

REFERENSI

- Biro Humas Lemhannas RI. (2024). Persaingan Antarnegara Picu Ketegangan di Kawasan Indo-Pasifik. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/2333-persaingan-antarnegara-picu-ketegangan-di-kawasan-indo-pasifik>
- Center for Strategic and International Studies. (2024). About Global Threats and Regional Stability. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/programs/international-security-program/global-threats-and-regional-stability/about-global-threats>
- Diara, D. D. (2020). Analisis Jejaring Sosial Dalam Mengetahui Kekuatan Diplomasi Digital Indonesia Di Kawasan Amerika Selatan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 364–395. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jiss.v1i05.72>
- Hara, A. E., Truhartono, A., & Indriastuti, S. (2023). Keamanan Insani(Human Security) Eksplorasi Berbagai Perspektif di Dunia (R. Frida (ed.); Edisi Pert). Pandiva Buku.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). Indonesia Gaungkan Diplomasi Digital di Kawasan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/584/berita/indonesia-gaungkan-diplomasi-digital-di->

kawasan#!

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). Presiden Jokowi Ajak PBB Perkuat Kerja Sama Demi Sejahterakan Rakyat. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/berita/presiden-jokowi-ajak-pbb-perkuat-kerja-sama-demi-sejahterakan-rakyat?type=publication>
- Kemmerling, B., Schetter, C., & Wirkus, L. (2022). The Logics of War and Food (in)Security. Global Food Security, 33(March), 100634. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2022.100634>
- Koraag, M. A., & Ahmad, G. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM INDONESIA KEPADA WNI YANG MENDAPATKAN HUKUMAN PIDANA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Novum: Jurnal Hukum, 11(3), 551–564. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.63565>
- Moenardy, D. F., & Chandra, M. P. (2021). Digital Diplomacy to Optimize Indonesian Trade on the International Stage. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(8), 495–500. <https://doi.org/10.17762/TURCOMAT.V12I8.2826>
- Nisa, K. (2022). Diplomasi Digital Dan Kedaulatan Siber Dalam Hubungan Internasional: Analisis Komparatif Kedaulatan Digital Indonesia, Kanada Dan Meksiko. Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan, 14(1), 91–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i1.6046>
- Nurhasya, M. J. (2018). Konsepsi Indo-Pasifik sebagai Sebuah Strategi Ketahanan Politik Luar Negeri Indonesia. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 6(1), 65–76. <https://prosiding.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/116>
- Ong'ong'a, D. O. (2021). Systematic Literature Review : Online Digital Platforms Utilization by the Ministry of Foreign Affairs in Adopting Digital Diplomacy. Shanlax: International Journal of Arts, Science, and Humanities, 9(1), 8–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.34293/sijash.v9i1.3313>
- Saunders, G. H., Jackson, I. R., & Visram, A. S. (2021). Impacts of face coverings on communication: an indirect impact of COVID-19. International Journal of Audiology, 60(7), 495–506. <https://doi.org/10.1080/14992027.2020.1851401>
- Sharma, A., & Sisodia, V. (2021). Digital diplomacy and the global pandemic. In Media Asia (Vol. 49, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/01296612.2021.1973324>
- Shrestha, N., Shad, M. Y., Ulvi, O., Khan, M. H., Karamehic-Muratovic, A., Nguyen, U. S. D. T., Baghbanzadeh, M., Wardrup, R., Aghamohammadi, N., Cervantes, D., Nahiduzzaman, K. M., Zaki, R. A., & Haque, U. (2020). The Impact of COVID-19 on Globalization. One Health, 11, 100180. <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100180>
- Simorangkir, Arnold Hiras, & Runtutambi, A. J. S. (2024). Budaya & Masyarakat Digital dalam Ketahanan Siber di Indonesia: Sebuah Adaptasi dari Pendekatan Capacity Maturity Model (CMM). Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(4), 922–938.
- Subiyanto, A., Boer, R., Aldrian, E., Perdinan, P., & Kinseng, R. (2018). Isu Perubahan Iklim Dalam Konteks Keamanan Dan Ketahanan Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional, 24(3), 287. <https://doi.org/10.22146/jkn.37734>
- Syaifani, S., & Qubba, N. R. (2017). Joko Widodo ' s Digital Diplomacy : A Prospect and Challenge for Indonesia ' s Digital Diplomacy towards Middle Power. Jurnal Hubungan Internasional, 10(2), 106–117. <https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7299>
- United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report: New Dimension Of Human Security (1994). In United Nations Development Programme 1994. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
- Wangke, H. (2020). Diplomasi digital dan kebijakan luar negeri indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wardhani, B., & Dugis, V. (2023). Indonesian Foreign Policy under the Jokowi Administration: Variations on Traditional Ideas. *Issues & Studies*, 59(03), 2350005.
<https://doi.org/10.1142/S1013251123500054>